

DINAMIKA KERUKUNAN INTERN UMAT ISLAM DALAM RELASI ETNISITAS DAN AGAMA DI KALTENG

The Dynamics of Intra-Religious Harmony Within Moslems in Relation Ethnic Religious Issue In Central Kalimantan

JOKO TRI HARYANTO

JOKO TRI HARYANTO

Balai Penelitian dan Pengembangan
Agama Semarang
Jl. Untung Suropati Kav. 70
Bambangkerop, Ngaliyan, Semarang
Telp. 024-7601327 Fax. 024-
7611386
e-mail: jejakagama@yahoo.co.id
Naskah diterima: 6 Februari 2013
Naskah direvisi: 22 Februari -
3 Maret 2013
Naskah disetujui: 5 Maret 2013

ABSTRAK

Agama Islam dianut oleh sebagian besar penduduk Kalimantan Tengah yang terdiri dari berbagai etnis seperti Dayak, Banjar, Jawa, Madura, dan lainnya. Penelitian ini mengkaji dinamika hubungan intern umat Islam dalam konteks relasi etnisitas dan agama di Kalimantan Tengah. Permasalahannya adalah bagaimana dinamika hubungan intern umat Islam, faktor pendukung kerukunan, dan strategi adaptasi membangun harmoni di Kalimantan Tengah. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, Focus Group Discussion (FGD), dan telaah dokumen. Hubungan intern umat Islam di Kalimantan Tengah diwarnai dengan tanggapan terhadap konflik etnis tahun 2001 antara Etnis Dayak dan Madura. Faktor yang mendukung kerukunan yang tercapai saat ini antara lain adanya daya tawar budaya, simbiosisme ekonomi, peran tokoh masyarakat, dan peran pemerintah. Adapun strategi adaptasi yang dilakukan untuk memelihara harmoni dilakukan secara kultural dengan revitalisasi dan akulturasi budaya dan nilai-nilai lokal, serta secara struktural dengan politik uniformitas baik yang dilakukan oleh pranata Adat Dayak maupun pemerintah Kalimantan Tengah.

Kata kunci: Kerukunan, Budaya Dominan, Politik Uniformitas, Strategi Adaptasi

ABSTRACT

Islam is professed by the majority of people in Central Kalimantan who consists of various ethnic groups such as the Dayak, Banjar, Javanese, Madurese, and others. This study discusses about the dynamics of internal relationship among Muslim in the context of the relationship of ethnicity and religion in Central Kalimantan. The problems are how the dynamics of the internal relationship amongst Muslims in Central Kalimantan and what factors are supporting to the reconciliation and adaptation strategies to build harmony amongst them. This research was carried out with the qualitative approach in which data were collected through interviews, observation, Focus Group Discussions (FGD), and document review. The results of the study show that the internal relations among Muslims in Central Kalimantan was coloured by the responses to the ethnic conflict in 2001 between Dayaknese and Madurese. The study can also reveal that the factors which support to the achieved-harmony today are include the bargaining power of the culture, economic symbiosism, the roles of both community leaders and the local govenment. The adaptation strategies carried out to maintain the harmony were conducted in two ways: culturally (revitalizing and acculturating cultures and local values) and structurally (political uniformity which is performed not only by the social institution of Dayaknese but also by the local government of Central Kalimantan).

Keywords: Harmony, Dominant Culture, Politics Uniformity, Adaptation Strategies

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebhinekaan yang menjadi ciri khas Bangsa Indonesia merupakan kekayaan sosial budaya yang luar biasa. Kenyataannya Bangsa Indonesia bukan saja Bhineka dalam suku, agama, dan ras, tetapi juga tingkat evolusi kebudayaannya, mulai dari masyarakat sangat sederhana sampai paling kompleks (Hikam, 2000:14). Kebinekaan ini di satu sisi menjadikan hubungan simbiosis mutualisme antar segmen masyarakat dapat terjalin, sebagai struktur fungsional dalam kehidupan sosial. Namun, kebinekaan juga disadari dapat menjadi sumber konflik yang akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, apabila tidak dikelola oleh anggota masyarakat dengan baik.

Individu-individu dalam masyarakat dengan konfigurasi pemilahan sosial yang terkonsolidasi cenderung lebih mudah melakukan subyektivitas konflik. Mereka juga lebih mudah untuk menerjemahkan konflik yang menyangkut kondisi obyektif (*objective conflict*) menjadi konflik yang menyangkut pribadi (*subjective conflict*), misalnya konflik mengenai persoalan ekonomi atau kriminal biasa berkembang menjadi konflik etnik atau konflik agama, baik konflik antar agama yang berbeda (*inter-religious conflict*) maupun konflik antar umat satu agama (*intra-religious conflict*) (Tumanggor et.al, 2009:11-12).

Umat Islam juga mengalami pemilahan sosial. Oleh karena pemahaman keagamaan, etnisitas pemeluknya, afiliasi organisasi kemasyarakatan, bahkan aspirasi politik. Suatu pemahaman keagamaan dapat pula mendorong munculnya gerakan keagamaan atau menjadi kelompok keagamaan tertentu yang membedakan dirinya dengan kelompok pemahaman yang lain. Ormas atau organisasi kemasyarakatan bisa muncul membawa aspirasi pemahaman keagamaan, aktivitas keagamaan, aktivitas sosial dan ekonomi, maupun politik tertentu.

Konfigurasi umat Islam yang semacam ini juga dapat saja saling kelindan satu aspek dengan

aspek yang lain. Suatu ormas Islam bisa saja diikuti oleh berbagai etnis, berbagai kelompok profesi, maupun memiliki beberapa aktifitas sosial, ekonomi, atau politik. Demikian juga dimungkinkan ada ormas yang anggotanya merupakan bagian dari anggota ormas-ormas yang lain. Konfigurasi lintas ini tentu dapat membangun dinamika yang positif dalam hubungan antarumat Islam sendiri. Dengan adanya keanggotaan silang dalam kelompok-kelompok di masyarakat, maka interaksi antarkelompok bisa terjadi secara lebih intens dalam konfigurasi tersebut.

Namun demikian, konfigurasi umat Islam tidak dipungkiri juga menjadi potensi pemilahan sosial yang rawan konflik. Segregasi sosial akibat pemilahan ini memungkinkan munculnya batas-batas budaya (*cultural boundaries*). Perasaan kelompok bisa terbangun dalam bentuk sentimen kelompok ormas, maupun kelompok etnis yang semakin mempertegas batas-batas tersebut. Batas-batas budaya ini apabila mengalami ketegangan maka dapat berpotensi menjadi konflik antarkelompok. Namun sebaliknya, batas-batas budaya ini dapat menjadi cair dan lentur oleh karena intensitas interaksi, penerimaan, dan toleransi satu kelompok atas kelompok yang lain.

Bercermin dari pengalaman di Kalimantan Tengah yang pernah mengalami konflik sosial, yakni antar suku Dayak dan Madura, ternyata masyarakat memiliki strategi adaptasi yang baik dalam rangka penyelesaian konflik. Masyarakat Kalimantan Tengah berhasil dengan cepat memulihkan situasi, bahkan merehabilitasi hubungan lebih cepat dari wilayah lainnya, misalnya konflik di Kalimantan Barat yang juga melibatkan etnis Madura (Cahyono, 2008). Hal ini diharapkan dapat menjadi model kerukunan di masyarakat, maupun penyelesaian konflik sosial, khususnya kerukunan intern umat Islam dalam berbagai konfigurasi sosialnya.

Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan:

1. Bagaimana dinamika hubungan intern umat Islam di Kalimantan Tengah?
2. Apa faktor pendukung kerukunan di Kalimantan Tengah?
3. Bagaimana strategi masyarakat dalam menjaga harmoni di Kalimantan Tengah?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika hubungan intern umat Islam, faktor pendukung kerukunan intern-umat Islam, dan strategi adaptasi masyarakat dalam menjaga harmoni di Kalimantan Tengah. Adapun manfaat penelitian ini secara teoretik diharapkan memberi informasi dan melengkapi hasil-hasil kajian tentang persoalan kerukunan umat beragama di masyarakat, khususnya kerukunan intern umat Islam di Kalimantan Tengah. Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah 1) untuk bahan penyusunan kebijakan dalam bidang kehidupan beragama terutama masalah kerukunan intern umat beragama, khususnya umat Islam oleh Kementerian Agama terutama Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), dan Direktorat Jenderal Bimas Islam; 2) bahan evaluasi terhadap rehabilitasi dan pemulihan kerukunan masyarakat di Kalimantan Tengah pasca konflik 2001 bagi pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan persoalan kerukunan di Kalimantan Tengah; dan 3) bahan penyusunan strategi resolusi konflik, rehabilitasi dan pemulihan kerukunan pada kasus-kasus konflik di masyarakat bagi pemerintah pusat dan daerah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang kerukunan dan resolusi konflik.

Kerangka Teoretik

Dinamika hubungan dalam penelitian ini adalah kondisi relasi sosial yang dilakukan antarelemen umat Islam dalam konteks waktu dan tempat. Relasi sosial ini meniscayakan kemungkinan terjadinya kohesi maupun segregasi sosial sebagai akibat dari tanggapan masyarakat

terhadap persoalan yang melingkupi dirinya. Internumat Islam adalah bagian-bagian dari struktur sosial masyarakat yang memeluk agama Islam, dan kaitannya dengan masyarakat muslim atau umat Islam sebagai bagian dari identitas diri yang mencakup identitas etnis dan identitas organisasi sosial. Dengan demikian penelitian ini tentang kondisi yang dinamis dari hubungan antarelemen dalam masyarakat Islam atau internumat Islam, yakni yang berada di Kalimantan Tengah.

Salah satu teori tentang masyarakat adalah teori fungsionalisme struktural. Teori ini memandang bahwa masyarakat haruslah dilihat sebagai suatu sistem yang tersusun dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain, dan saling pengaruh mempengaruhi antarbagian tersebut secara ganda dan timbal balik. Dalam sebuah masyarakat, integrasi sosial tidak pernah tercapai dengan sempurna, tetapi secara fundamental bergerak ke arah *equilibrium* yang bersifat dinamis. Adapun ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan akan senantiasa terjadi juga, akan tetapi di dalam jangka panjang keadaan tersebut pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses institusionalisasi. Dengan demikian perubahan dipandang sebagai proses adaptasi dan penyesuaian, dan tumbuh bersama dengan differensiasi dan inovasi yang diintegrasikan melalui pemilikan nilai-nilai yang sama (Zamroni, 1992: 25; Nasikun, 1992: 11-12).

Konsep lain yang penting dalam penelitian ini adalah identitas sosial dan strategi adaptasi. Identitas sosial, menurut Jenkin (dalam Jamil, 2012: 19), secara sederhana dapat dipahami sebagai konsep mengenai siapa seseorang atau kelompok orang dikenali oleh orang/kelompok lain, atau juga mengenai seseorang dikenali dalam kelompoknya sendiri. Dengan demikian identitas sosial merupakan ciri-ciri kelompok yang membedakan dengan kelompok lain, dalam hal ini dapat berbentuk identitas etnis (*ethnicity*) yang terbentuk karena perbedaan budaya, tradisi, dan bahasa.

Masing-masing kelompok berupaya hidup bersama dalam perbedaan-perbedaan identitas tersebut dengan mengembangkan strategi adaptasi, yakni cara-cara yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang untuk menyesuaikan dirinya dengan perubahan dan situasi sosialnya. Pengertian adaptasi dalam hal ini merujuk pada mekanisme bagaimana manusia memperoleh keinginannya atau menyesuaikan hidupnya kepada lingkungan pergaulannya (Jamil. 2012. 30). Dengan strategi atau cara-cara tertentu kelompok-kelompok sosial menjalani hubungan dengan kelompok lainnya dalam masyarakat muslim atau umat Islam guna memenuhi tujuan-tujuan dirinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang dinamika hubungan internumat Islam di Kalimantan Tengah ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan bulan Pebruari-April 2012 di Kalimantan Tengah, dengan mengambil lokus penelitian di Kota Palangkaraya dan Kota Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur). Sebagaimana diketahui, Kalimantan Tengah pernah mengalami konflik sosial antara etnis Dayak dengan Etnis Madura. Kejadian tersebut mempengaruhi dinamika hubungan internumat Islam di Kalimantan Tengah. Kedua lokus ini dipandang sebagai representasi dari wilayah Kalimantan Tengah, di mana Sampit merupakan wilayah awal dari peristiwa konflik tersebut, sementara Palangkaraya merupakan daerah imbas akibat efek domino konflik yang kemudian juga menyebar di hampir seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

Pengumpulan data-data lapangan dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dokumen, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur kepada pihak-pihak yang dipandang representatif terkait dengan persoalan penelitian, yaitu tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama; anggota masyarakat dari etnis Dayak, Madura, Banjar, Jawa dan lainnya; warga masyarakat yang berafiliasi pada organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) dan

Muhammadiyah. Wawancara ini ditujukan untuk menggali pandangan mereka terhadap dinamika hubungan internumat Islam, dan mendalami aspek-aspek terkait dengan persoalan tersebut. Teknik observasi dilakukan untuk melihat secara langsung perikehidupan dan interaksi sosial yang dilakukan oleh umat Islam lintas baik dalam lingkup kelompok tertentu maupun lintas kelompok. Dalam beberapa kegiatan observasi, peneliti melakukan observasi terlibat (*participant observation*) dengan mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, terutama dalam kegiatan keagamaan, seperti acara “yasin-tahlil”.

Telaah dokumen dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan persoalan penelitian yang berasal dari dokumen-dokumen tertulis, baik laporan-laporan dari lembaga pemerintah maupun lainnya, dan perda (peraturan daerah) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang relevan dengan penelitian ini. Adapun *Focus Group Discussion* (FGD) ini dilaksanakan dua kali, yaitu di KUA Kecamatan Pahandut dan di Kantor Kemenag Kotawaringin Timur yang masing-masing diikuti 10 orang tokoh masyarakat lintas etnis dan lintas ormas. FGD ini dilakukan untuk mengkonfirmasi data-data yang telah diperoleh, dan menggali informasi-informasi baru yang belum diperoleh dalam teknik lainnya.

Analisis terhadap data-data penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif, yang merupakan suatu alur kegiatan yang meliputi : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 1998: 190). Analisis terhadap data ini menggunakan paradigma positivisme dengan pendekatan fungsionalisme struktural.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setting Sosio-Religius Masyarakat Kalteng

Penduduk Kalimantan Tengah secara komposisi cukup heterogen dari sisi agama maupun etnis. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Kalimantan Tengah sebanyak 2.202.599 jiwa (BPS, 2011). Komposisi

penduduk berdasarkan agama menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk beragama Islam, yakni 1.617.812 jiwa (71,99%), diikuti oleh umat Kristen 350.634 jiwa (16%), baru kemudian Katolik 75.284 jiwa (3,35%), Hindu 191.682 jiwa (8,52%), Budha 3.993 jiwa (0,17%), Khonghucu 406 jiwa (0,01%) dan lainnya 7.384 jiwa (0,32%) (Kanwil Kemenag Kalteng, 2010).

Dari jumlah pemeluk agama seperti tersebut dapat dipahami bahwa agama asli orang Dayak, yakni Kaharingan tidak berkembang. Hal ini disebabkan karena terjadinya gelombang masuknya agama-agama baru yang datang kemudian, seperti Islam, Kristen, Katolik, dan Konghucu. "Umat Islam di sini sekitar 76%, Dayak Islam sebenarnya sedikit saja, karena di sini ada orang-orang Banjar, Jawa jadi muslimnya banyak." Demikian diungkapkan oleh H.Hamsan, mantan Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Kecamatan Pahandut.

Di Kalimantan Tengah, terdapat banyak kelompok etnik, seperti misalnya Dayak, Banjar, Jawa, dan Madura. Etnik Dayak merupakan etnik asli masyarakat Kalimantan Tengah dan umumnya Kalimantan. (Riwut, 1993:229). Dengan adanya transformasi sosial berupa kedatangan agama-agama baru tersebut memang menjadikan banyak pilihan bagi masyarakat Kalimantan Tengah untuk memilih agama yang sesuai dengan hati nuraninya. Penduduk yang memeluk agama-agama pendatang tersebut juga berasal dari banyak etnis. Akan tetapi terdapat kecenderungan utama, yakni bahwa orang Banjar, Madura, dan Bugis hampir dapat dipastikan memeluk Islam. Hal tersebut berbeda dengan orang-orang Dayak, yang tidak seluruhnya memeluk Agama Hindu. Akan tetapi pemeluk Agama Hindu (Kaharingan) bisa dipastikan adalah orang Dayak (Ahmad Syafi'i dalam Azra *ed.*, 1998: 39).

Adapun komposisi penduduk berdasarkan etnis, berdasarkan data Suryadinata, dkk. (dalam Cahyono, 2008: 45) di tahun 2003 di Kalimantan Tengah sebagian besar adalah Suku Dayak dari berbagai sub-suku adalah 742.729 jiwa atau 41,24% (terdiri dari Dayak Ngaju 18,02%, Dayak

Sampit 9,57%, Dayak Bakumpai 7,51%, Dayak Katingan 3,34% dan Dayak Ma'anyan 2,8%), dilanjutkan Suku Banjar sebanyak 435.756 jiwa atau 24,2%, lalu Jawa 325.160 jiwa atau 18,06%, kemudian Madura 62.228 jiwa atau 3,46%, Suku Sunda 24.479 atau 1,36%, dan sisanya suku-suku lain seperti Bugis, Betawi, Minangkabau, dan Banten.

Proses migrasi telah menyebabkan perubahan yang cukup signifikan dalam komposisi penduduk berdasarkan kelompok etnik. Pada tahun 1980 jumlah migran yang diorganisir oleh pemerintah melalui program transmigrasi hanya mencapai 1 persen saja dari jumlah penduduk Kalimantan Tengah, dan pada tahun 2000 meningkat hingga 21 persen. Keberadaan pendatang ini sering disebut sebagai faktor di balik berlangsungnya proses marginalisasi penduduk asli Dayak, akibat ketidakmampuan mereka bersaing dengan penduduk pendatang (Cahyono, 2008: 45).

Di Kalimantan Tengah, masyarakat Dayak lebih menerima identitas secara bersama sebagai identitas Kalimantan secara keseluruhan, sehingga dalam pergaulan sehari-hari antar-etnis menggunakan bahasa Banjar. Meskipun demikian, Etnis Dayak di Kalimantan Tengah mengorientasikan identitas sosialnya kepada sukunya masing-masing, seperti Dayak Ngaju, Dayak Kapuas, dan sebagainya; dan bukan tidak mengorientasikan identitasnya pada satu agama, sebagaimana Dayak di Kalimantan Barat yang mengidentifikasi diri sebagai Kristen yang dibedakan dengan Islam yang Melayu (Cahyono, 2008: 46).

Hubungan intern umat Islam terjadi antara kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas dalam umat Islam, baik antaretnis maupun antar ormas keagamaan dalam Islam. Di Kalimantan Tengah ini terdapat berbagai organisasi keagamaan, di mana yang paling banyak menjadi afiliasi dan orientasi keagamaan adalah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah lengkap dengan lembaga otonomnya. Masyarakat Kalimantan Tengah yang budaya Etnis Dayak be-

gitu dominan, juga terdapat lembaga adat yang dipandang memiliki otoritas dalam masyarakat yaitu Dewan Adat Dayak (DAD).

Lembaga adat tersebut berfungsi menjaga keharmonisan tata kehidupan masyarakat adat di Kalimantan Tengah, mencakup hukum adat, norma-norma, pranata-pranata, dan nilai-nilai budaya. Dengan demikian, peran utama lembaga adat tersebut adalah mencakup pelestarian budaya Dayak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak, dan sekaligus menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat Dayak. Masyarakat Dayak lebih memilih menyandarkan segala urusannya pada kebudayaan adat ketimbang dengan agama (wawancara dengan Sawerdi, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kec. Sabangau).

Dinamika Hubungan Internumat Islam Kalimantan Tengah

Pandangan masyarakat terhadap situasi hubungan internumat Islam di Kalimantan Tengah seringkali dihubungkan dengan kejadian kerusuhan di tahun 2001, yakni konflik Suku Dayak dengan Suku Madura. Berbagai kajian menegaskan bahwa konflik tersebut adalah konflik antaretnis, bukan konflik agama. Madura telah dikenal sebagai warga yang memeluk agama Islam, tetapi warga Dayak pun tidak sedikit yang juga memeluk agama Islam. Sekitar 70 persen dari orang Dayak di Kalimantan Tengah adalah Muslim. Oleh karena itu hubungan intern umat Islam, juga menyinggung hubungan antara etnis Madura dengan Dayak yang beragama Islam, dan dengan etnis-etnis lainnya yang anggotanya beragama Islam.

Suku Dayak dan Suku Madura adalah dua suku yang sangat menonjol dan dominan di Kalimantan Tengah sebelum terjadinya kerusuhan 2001 tersebut. Relasi antara Dayak-Madura diwarnai pencitraan dan stereotipe tentang orang Madura yang sudah ada sebelum mereka berinteraksi langsung dengan orang Madura. Padahal keberadaan warga Madura di Kalimantan Tengah telah lama. Bahkan menurut penuturan Cimanur, tokoh Dayak di Sampit, bahwa kakeknya dahulu, sekitar tahun 1930-an, pernah men-

datangkan ratusan orang Madura orang untuk diajak bekerja di lahannya. Hubungan Madura dengan etnis lainnya terjalin biasa saja, terikat atas dasar simbiosis mutualisme, di mana mereka saling bekerja sama yang saling menguntungkan. Perkembangannya warga Madura kemudian mendominasi ekonomi, adanya sikap sebagian warga Madura yang kurang baik, tidak adanya ketegasan hukum terhadap kekerasan yang melibatkan orang Madura, menjadikan stereotip Madura dipandang sebagai kelompok suka memaksakan kehendak dan mau menang sendiri semakin menguat. Sebenarnya banyak juga warga Madura yang memiliki sikap yang baik, tetapi kalah dengan citra negatif yang terbentuk dari sikap buruk warga Madura lainnya (wawancara H. Hamsan, mantan P3N Kecamatan Pahandut).

Akhirnya, di penghujung Februari 2001 konflik etnis antara Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah pecah. Tindak pembunuhan dan perusakan nyaris berlangsung di semua wilayah. Semula, kerusakan terjadi hampir sepekan di Kota Sampit, kemudian merembet ke Kuala Kapuas, Pangkalan Bun, dan Palangkaraya. Kurang dari dua pekan, 400 orang Madura terbunuh, dan 80.000 sisanya dipaksa keluar dari bumi Kalimantan untuk kembali ke daerah asalnya, Madura maupun tempat lainnya (Cahyono, ed., 2008: 4-5).

Tentu ada berbagai faktor lain dalam peristiwa kerusuhan tersebut, seperti tidak ditegakkannya hukum, situasi politik yang tidak menentu, *euphoria* otonomi daerah, dan adanya perbedaan kebudayaan antara warga asli dengan “pendatang”. Ketimpangan ekonomi juga menjadi faktor paling signifikan, terutama kebijakan “komersialisasi” hutan, di mana hutan merupakan sumber penghidupan etnik Dayak. Lebih jauh lagi, konflik tersebut muncul disebabkan karena Etnik Dayak yang merupakan penduduk asli Kalimantan, mengalami pelemahan secara sistemik. Berawal dari pembabatan hutan yang bagi warga Dayak merupakan sumber ekonomi dan ekspresi kebudayaan mereka baik oleh pendatang transmigrasi maupun perusahaan Hak Penggunaan

Hutan (HPH). Proses ini kemudian menjalar ke bidang politik dan pemerintahan, sosial dan budaya, yang menjadikan etnik Dayak semakin terpinggirkan.

Peristiwa konflik tersebut menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan aspek sosial, budaya, dan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah. Etnik Dayak kemudian menjadi etnik tunggal yang dominan di Kalimantan Tengah baik secara kultural maupun struktural. Terjadi standarisasi kehidupan sosial budaya dan hukum dengan standar budaya Dayak, yang terlihat dari peran yang dominan dari Dewan Adat Dayak (DAD) terhadap kehidupan sosial, standar cara pandang dan nilai kebudayaan. Misalnya orang pendatang boleh datang kembali ke Kalimantan Tengah dan menjadi saudara orang Dayak melalui falsafah hidup *Huma Betang* dan *Belum Bahadat*.

Standar kebudayaan Dayak tersebut di atas relatif cukup berhasil dalam upaya mengkonstruksi sosial dan membangun kembali kerukunan masyarakat pasca kerusuhan yang melibatkan etnis Dayak dan Madura tersebut. Masyarakat Dayak dan masyarakat etnis lainnya telah menerima kembali warga Madura di Bumi Tambun Bungai ini. Dua atau tiga tahun setelah peristiwa itu, orang Madura telah dapat kembali untuk bersama-sama bermasyarakat dan bekerja mencari nafkah, dan berangsur-angsur hingga saat ini.

Sementara di sisi lain, etnis lainnya juga turut memberikan sumbangsih bagi terciptanya situasi damai pasca konflik. Beberapa etnis seperti Banjar dan Jawa, telah lama dikenal sebagai masyarakat yang terbuka dan ramah. Banjar juga dipandang sangat memegang teguh nilai-nilai ajaran Islam. Sementara Madura yang kembali, juga telah bersedia melakukan perubahan-perubahan sikap yang baik dalam berhubungan kelompok masyarakat lainnya.

Dinamika inten umat Islam juga terkait dengan ormas-ormas keagamaan yang memiliki perbedaan pemahaman keagamaan di masyarakat, seperti ormas Nahdatul Ulama dan Mu-

hammadiyah. Hubungan kedua ormas ini secara organisatoris tidak ada persoalan. Namun, dalam dataran massa, perbedaan-perbedaan pandangan keagamaan menjadi penyekat hubungan antar anggota/simpatian ormas. Munculnya istilah “kelompok tua” dan “kelompok muda”, menunjukkan adanya batas budaya antara kelompok yang memegang tradisi dengan kelompok yang berpandangan purifikasi. Perbedaan pandangan ini tidak sampai menimbulkan konflik terbuka antar kelompok, sehingga dapat terjaga kerukunan intern umat Islam. Hal ini peran para tokoh agama yang mendorong toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan pandangan keagamaan. Demikian pula pemerintah, yakni kebijakan Kementerian Agama seperti di Kota Palangkaraya dan Kota Sampit yang mengatur jadwal khatib secara silang antara NU dan Muhammadiyah. Program ini setidaknya-tidaknya semakin mendekatkan jarak sosial komunitas NU dan Muhammadiyah.

Faktor Pendukung Kerukunan

1. Daya Tawar Budaya, antara Dominasi dan Akulturasi

Pengalaman marginalisasi Dayak di masa lalu hingga sampai terjadi konflik telah mendorong budaya Dayak menjadi budaya dominan, yakni pemosisian status sosial tinggi dan sejumlah keistimewaan dibandingkan budaya yang lain. Dayak saat sekarang ini telah mampu mengambil peran sosial politik, baik dalam struktur sosial maupun gerakan sosial, seperti ditunjukkan dengan menguatnya struktur adat Dayak, perangkat adat dan pemberlakuan wilayah hukum dan budaya adat. Budaya Dayak sebagai satu-satunya budaya dominan menjadikan tidak adanya gesekan antar budaya yang memicu munculnya konflik.

Hal ini sebenarnya patut untuk diwaspadai karena budaya dominan juga mendorong munculnya seperangkat prasangka terhadap golongan lain yang ada dalam masyarakatnya. Prasangka ini berkembang berdasarkan pada adanya perasaan superioritas pada mereka yang tergolong dominan; menganggap kelompok lain sebagai orang asing; dan adanya klaim bahwa akses

sumber daya yang ada adalah hak mereka, dan disertai kecurigaan kelompok lain akan mengambil sumberdaya-sumberdaya tersebut (Suparlan, 2004). Dengan demikian, penerimaan terhadap budaya dominan ini hanya strategi *Coping* berupa tindakan diam dan menghindari masalah untuk memelihara eksistensinya dan menjaga agar tetap *survive* dengan tidak memancing persoalan dengan kelompok lain yang dapat menimbulkan kesulitan bagi dirinya di lingkungan budaya dominan (Farida, 2006: 25).

Pergeseran lainnya dalam gerakan sosial, terlihat nyata dalam kasus penolakan terhadap Front Pembela Islam (FPI) di Palangkaraya. Demonstrasi yang massif di Bandara Cilik Riwut oleh unsur Dewan Adat Dayak (DAD) atau pemuda Dayak, dapat dilihat sebagai anomali dari sifat orang Dayak yang toleran dan mudah mengalah. Penolakan ini didasari, bahwa FPI dianggap sebagai organisasi sosial keagamaan yang beraliran keras sehingga dikhawatirkan akan merusak hubungan baik yang sudah terbentuk, terutama pascakonflik etnik (wawancara dengan H. Abdul Hadi Ridwan, Ketua MUI Kab.Kotawaringin Timur).

Walaupun budaya dominan Dayak ini menguat, tetapi faktor instrinsik budaya Dayak sejak awal juga sangat mendukung terciptanya kerukunan di Kalimantan Tengah. Etnis Dayak dikenal memiliki nilai-nilai budaya *huma betang* yang sangat toleran terhadap keberadaan orang lain, ketaatan pada aturan, dan juga kesetaraan. Hal ini menunjukkan kebersediaan untuk hidup rukun, saling menghormati dalam satu kehidupan bersama.

Sementara etnis lainnya juga turut mendukung kerukunan bersama. Etnis Banjar dan etnis Jawa selama ini dikenal sebagai warga yang mampu berbaur dan santun dalam pergaulan di masyarakat. Terutama Jawa, dikenal sebagai warga yang sangat mengedepankan kerukunan dan bersedia mengalah. Etnis Madurapun pada saat sekarang ini telah mengubah sikap dan perilakunya yang negatif, sehingga masyarakat, khususnya Dayak dapat menerima kembali

warga Dayak untuk bersama-sama bekerja dan membangun Kalimantan Tengah. Sikap-sikap positif dari masing-masing etnis ini mendorong pembauran batas-batas kelompok yang semakin menguatkan kohesi sosial.

Terlebih dengan adanya penyatuan budaya atau akulturasi yang menciptakan ikatan sosial baru atau memperkuat ikatan sosial yang telah ada, dan semakin menuju pada keseimbangan, sebagaimana ditunjukkan dalam fungsionalisme struktural (Zamroni, 1992: 25). Hal ini ditunjukkan dengan pergeseran tradisi guna menyesuaikan dengan budaya yang diterima sebagai bagian dari dirinya, seperti penggunaan darah yang diganti tepung tawar pada perkawinan adat Dayak muslim. (Wawancara dengan Basel, Damang Adat Kecamatan Sabangau; Rina Mislia, Ketua Majelis Taklim Ibu-ibu Kel. Sabaru). Ditambah lagi dengan fenomena perkawinan lintas etnis (*amalgamasi*), baik antara Dayak dengan Banjar atau Jawa, bahkan juga dengan Madura. (wawancara dengan Syahriansah, tokoh Madura di Sampit).

2. Simbiosisme Ekonomi

Keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mendorong interaksi dengan orang lain. Hal ini karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan keberadaan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak bisa dipenuhinya sendiri. Salah satu perangkat pemenuhan kebutuhan adalah ekonomi, di mana interaksi yang berjalan secara positif akan mendorong kerjasama, tetapi sebaliknya, interaksi yang terjadi secara asertif atau negatif maka malah akan menimbulkan pertentangan (Taneko, 1990: 116). Dalam konteks masyarakat Kalimantan Tengah, pada masa lalu terjadi marginalisasi terhadap Dayak sehingga menghalangi akses terhadap sumber daya ekonomi hutan menimbulkan konflik.

Diakui sendiri oleh Cimannur, Tokoh Dayak di Sampit, ketergantungan Dayak dengan hutan sangat besar. Dari hutan mereka bisa menghasilkan bahan-bahan produksi seperti kayu, rotan, karet, dan sebagainya dengan hasil yang besar.

Namun sebagian besar mereka tidak memiliki ketrampilan yang lebih baik untuk mengolah persawahan, membangun gedung, serta menjadi pedagang yang sukses. Akibatnya mereka memiliki ketegantungan dengan etnis lain untuk kepentingan tersebut.

Warga etnis Madura selama ini telah dikenal dengan etos kerjanya yang tinggi, bahkan mereka bersedia melakukan pekerjaan kasar dan menerima upah rendah. Demikian juga suku Jawa dikenal ulet dalam bekerja, dan terutama berdagang olah-olahan pangan seperti warung makan. Sementara Banjar sejak dahulu dikenal pula sebagai pedagang yang ulet dan berhasil.

Situasi sosial ekonomi termasuk yang mendorong kohesi sosial dan integrasi masyarakat di Kalimantan Tengah. Bahkan diakui oleh Zaenuddin, pejabat di Kemenag Kotim, bahwa selama setahun pascakonflik 2001, masyarakat kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan, karena umumnya yang bekerja di sektor pertanian adalah orang-orang Madura. Kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup inilah yang mempercepat pula pemulihan pasca konflik, karena terciptanya situasi yang kondusif juga akan mendukung terpenuhinya kebutuhan bersama.

3. Peran Para Tokoh Masyarakat dan Pemerintah

Proses rekonsiliasi masyarakat pascakonflik 2001 tidak bisa dilepaskan dari peran tokoh-tokoh masyarakat. Mereka inilah yang berperan meredakan amuk massa, dan menjadi penjamin bagi pengungsi yang hendak kembali ke Kalimantan Tengah. (Wawancara Gusti Misruni tokoh Dayak Pahandut, H. Abdul Hadi Ridwan Ketua MUI Kotim, H. Nasihin Tokoh NU Kotim). Pascakonflik peran mereka juga sangat penting, karena umumnya masyarakat Kalimantan Tengah sangat mempercayai dan mengikuti pendapat tokoh-tokohnya ini.

Besarnya peran tokoh dan pengaruhnya pada proses sosial di Indonesia antara lain karena masyarakat masih menganut budaya patrilineal (*patriachi*) dan *patron-client*. Tokoh-tokoh di

masyarakat, baik tokoh agama maupun tokoh adat merupakan pihak yang dipandang memiliki status sosial tertentu yang baik berupa *Ascribed Status* (status yang tidak memperhatikan perbedaan jasmani atau rohani karena status tersebut diperoleh karena kelahiran atau hasil keturunan), maupun *Achieved Status* (status yang dicapai oleh seseorang melalui usaha-usaha yang disengaja, usaha dan kerja keras) yang dengan status tersebut dirinya memerankan diri sebagai tokoh (*key person*) (Patoni, 2007; 44). Mereka ini menjadi pemimpin-pemimpin informal yang suaranya didengar dengan kepatuhan oleh masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap persoalan-persoalan di masyarakat, termasuk konflik sosial, sangat tergantung pandangan dari tokoh-tokoh tersebut.

Menurut Muhtadi dan Sudharto (dalam Pahrudin, 2003: 23-24) peran tokoh (*informal leader*) terutama tokoh agama (Islam) dalam masyarakat sangat jelas dalam proses pembangunan di Indobesia, program-program pemerintah dapat berhasil atau gagal juga tergantung pemersertaan pemuka masyarakat setempat. Hal ini karena pemuka masyarakat tersebut telah diakui mampu memerankan diri menjadi pembimbing, motivator, sumber pengetahuan, teladan dan mengawasi umatnya. Selain itu, budaya paternalistik pada masyarakat Indonesia memungkinkan adanya teladan dari agen perubahan sosial, yakni para tokoh di masyarakat tersebut.

Pemulihan situasi pascakonflik sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah, berupa *settlement* yang koersif untuk menghentikan tindakan-tindakan kekerasan. Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dan kabupaten lainnya mengeluarkan perda-perda terkait pemulihan keagamaan dan resolusi konflik. Pemerintah mengembangkan kebijakan untuk menguatkan budaya Dayak sebagai suatu uniformitas budaya di Kalimantan Tengah. Kebijakan ini, dalam suasana pemulihan pasca konflik telah mampu mengembalikan kerukunan masyarakat. Namun, kebijakan ini perlu ditinjau kembali, karena uniformitas yang mendorong munculnya budaya dominan, dalam

waktu lama akan menjadi bom waktu yang merusak kerukunan bersama dalam konteks masyarakat yang plural.

Strategi Adaptasi Membangun Harmoni

1. Strategi Kultural :

Masyarakat Kalimantan Tengah telah belajar secara baik dengan peristiwa konflik yang menimpanya. Masyarakat Dayak telah menemukan ikatan social baru, yakni perasaan bersama sebagai warga Kalimantan Tengah melalui falsafah hidup *Huma Betang*. Oleh karena itu, di Kalimantan Tengah dilakukan revitalisasi terhadap nilai-nilai budaya lokal sebagai modal kultural yang mendorong relasi sosial yang akomodatif menuju kerukunan masyarakat.

Di antara modal kultural budaya tersebut adalah falsafah budaya *huma betang* yang mencerminkan perilaku hidup yang menjunjung tinggi kejujuran, kesetaraan, kebersamaan dan toleransi, serta taat pada hukum (hukum negara, hukum adat, dan hukum alam). Ungkapan *Bumi Dipijak Langit Dijunjung*, dalam tradisi kebudayaan masyarakat Kalimantan Tengah, terutama Dayak, tidak hanya merupakan peribahasa, melainkan sebuah pandangan hidup dan etika hubungan sosial di tengah heterogenitas etnis dan agama di wilayah tersebut. *Belom Penyang Hinje Simpei*, bahwa orang hidup haruslah penuh kerukunan dan menjaga persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan bersama.

Akulturasinya budaya, dimotori oleh misalnya kesamaan agama (Islam), dimana banyak juga warga Dayak yang memeluk Islam. Selain adanya kesamaan agama, pola akulturasi yang terjadi juga melalui perkawinan antar etnik. Kedua hal ini menjadikan terjadinya perasaan bersama sebagai warga Kalimantan Tengah dan terbentuklah kebudayaan akulturasi. Modal yang dikembangkan adalah ketersediaan menerima dan beradaptasi. Ketersediaan menerima dilakukan oleh warga asli, yakni menerima budaya dari luar sebagai bagian dari kebudayaan bersama Kalimantan Tengah. sementara ketersediaan untuk beradaptasi dilakukan oleh warga pendatang, ter-

utama adalah warga Madura untuk beradaptasi dengan kebiasaan dan kebudayaan lokal di Kalimantan Tengah.

2. Strategi Struktural

Selain modal-modal kultural tersebut, relasi damai juga terbangun melalui jalur struktural, yakni politik uniformitas yang diberlakukan di wilayah Kalimantan Tengah. Politik uniformitas tersebut didukung secara struktural dalam bentuk penguatan adat Dayak. Ikatan sosial baru berupa uniformitas kebudayaan, atau standarisasi menggunakan satu kebudayaan yang dijadikan sebagai standar dan dianggap unggul atau dominan, yakni Dayak. penerapan standar kebudayaan ini misalnya dapat dilihat melalui penerapan Dewan Adat Dayak (DAD) yang peranan dan kewenangannya sangat luas hingga mengurus urusan-urusan perdata, cara, dan pidana dalam kehidupan social warga Kalimantan Tengah.

Politik uniformitas didukung dengan keterlibatan pemerintah daerah dalam menguatkan struktur Dewan Adat Dayak (DAD) di dalam kehidupan social masyarakat. Peraturan pemerintah daerah ini menyebutkan kelembagaan DAD sebagai salah satu lembaga yang diakui pemerintah, dan kewenangannya juga begitu kuat. Kebijakan pemerintah daerah dalam menerapkan politik uniformitas juga menggunakan etika dan sudut pandang satu kebudayaan standar yang dianggap lebih unggul, yakni kebudayaan Dayak. Pemerintah daerah menghendaki bahwa warga Kalimantan Tengah hidup rukun dan damai dalam ikatan social baru yang lebih mampu menjamin keberlangsungan antar etnis dan agama di Kalimantan Tengah.

Pengalaman konflik etnis tahun 2001 antara etnis Dayak dan etnis Madura mendasari pola hubungan antaretnis dewasa ini. Etnis Dayak meneguhkan dominasi melalui jalur kultural maupun struktural, di mana hal ini diterima oleh etnis lain untuk membangun ikatan sosial baru. Dinamika relasi sosial dewasa ini menunjukkan bahwa situasi kerukunan di Kalimantan Tengah telah dapat mencapai tingkat perdamaian, meskipun taraf perdamaian negatif. Perdamaian

negatif ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap perbedaan, tetapi secara struktural belum memberi akses yang berimbang pada semua pihak. (Susan 2009. 132) Kebijakan *uniformitas* yang dikembangkan di Kalimantan Tengah mendorong –atau memaksa-- proses keseimbangan dalam masyarakat sebagai kesatuan. Hal ini termasuk proses institusionalisasi budaya untuk menjamin keselarasan dan berjalannya fungsi-fungsi sosial akibat adapun ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan terjadi (Zamroni, 1992: 25), berupa pertentangan atau konflik sehingga struktur-struktur sosial dalam masyarakat dapat fungsional kembali.

PENUTUP

Simpulan

Hubungan internumat beragama mengalami dinamika sesuai tanggapan atas persoalan yang dihadapi. Di Kalimantan Tengah, dinamika ini dapat dilihat dari proses relasi antar etnis dalam lingkungan umat Islam, baik sebelum terjadinya konflik besar tahun 2001 yang berawal dari Sampit, hingga saat sekarang ini. Dinamika relasi sosial dewasa ini menunjukkan bahwa situasi kerukunan di Kalimantan Tengah telah dapat mencapai tingkat perdamaian, meskipun taraf perdamaian negatif. Perdamaian negatif ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap perbedaan, tetapi secara struktural belum memberi akses yang berimbang pada semua pihak. Hal ini karena adanya kebijakan *uniformitas* yang dikembangkan di Kalimantan Tengah.

Namun demikian, suasana kondusif dan rukun di masyarakat dapat terwujud dengan menekan terjadinya konflik. Adapun faktor pendukung kerukunan dalam hubungan internumat Islam terutama muncul dari modal-modal kultural yang selama ini ada dalam kehidupan masyarakat sendiri, kepentingan kerjasama ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan, peran tokoh masyarakat, dan peran pemerintah setempat.

Strategi yang dipakai guna menciptakan kehidupan yang harmonis, terutama pasca terjadi-

nya konflik adalah menggunakan dua pendekatan, yakni kultural dan struktural. Pendekatan kultural mencakup revitalisasi nilai-nilai kebudayaan sebagai komitmen untuk hidup bersama dalam situasi yang damai. Pendekatan struktural yang dimainkan adalah melalui politik *uniformitas* atau penyeragaman menjadi satu identitas.

Rekomendasi

Berangkat dari temuan-temuan penelitian ini maka, beberapa hal yang dapat disarankan pada pihak-pihak terkait adalah:

1. Perlunya penguatan dan revitalisasi nilai-nilai budaya yang mendorong pada kerukunan umat beragama dan masyarakat pada umumnya.
2. Memperbesar ruang temu budaya untuk membuka dialog kebudayaan yang membuka sikap saling memahami antarbudaya
3. Meninjau kembali politik *uniformitas* kebudayaan yang mendorong pandangan etnosentrisme dan budaya dominan dengan mempertimbangkan strategi multikulturalisme guna mencairkan batas-batas budaya.
4. Membangun kerukunan harus pula menyelesaikan faktor-faktor yang menjadi permasalahan hubungan sosial, terutama ketidakadilan secara politik dan ekonomi yang memarginalkan sebagian kelompok masyarakat secara sistemik.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan memberi kontribusi bagi pengembangan dunia ilmu pengetahuan, terutama studi perdamaian (*peace studies*), khususnya membantu memelihara situasi damai di Kalimantan Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi (ed). 1998. *Agama dalam Keagamaan Etnik di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Agama Departemen Agama.
- BPS. 2011. *Kalimantan Tengah dalam Angka 2010*. Palangkaraya: BPS Provinsi Kalimantan

- tan Tengah
- Cahyono, Heru. Dkk. 2008. *Konflik Kalbar dan Kalteng Jalan Panjang Meretas Perdamaian*. Yogyakarta: P2P-LIPI bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- Farida, Anik. 2006. *Survival Umat Khonghucu dalam Pemenuhan Hak-hak Sipil*. Dalam Alam, Rudy Harisyah (ed). *Adaptasi dan Resistensi Kelompok-kelompok Sosial Keagamaan*. Jakarta : Penamadani bekerjasama dengan Balai Litbang Agama Jakarta. Hlm. 19-50.
- Hikam, Muhammad A.S. 2000. *Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society*. Jakarta: Penerbit Airlangga.
- Jamil, M. Muhsin. 2012. "Dinamika Identitas dan Strategi Adaptasi Minoritas Syi'ah di Jepara". Ringkasan Disertasi Program Doktor Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang
- Kanwil Kemenag Kalteng. 2010. *Data-data Keagamaan tahun 2010*.
- Moleong, Lexy J. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Rosda karya.
- Nasikun. 1992. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawaliipress
- Pahrudin, Agus. 2003. Peran Mubaligh dalam Menunjang Program Pembangunan Masyarakat (Studi Kasus pada Mubaligh Kader Pembangunan di Desa Kerawang Sari Kecamatan Lampung Selatan). *Jurnal Analisis* Edisi Juli 2003 Vo.3 No.1. IAIN Raden Intan Bandar Lampung. hlm.22-37. Dalam <http://idb2.wikispaces.com/file/view/ok2007.pdf> diunduh 11 Juni 2012.
- Patoni, Achmad. 2007. *Peran Kyai Pesantren dalam Partai Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riwut, Tjilik. 1993. *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana
- Suparlan. 2004. *Masyarakat Majemuk, Masyarakat Multiultural, dan Minoritas: Memperjuangkan Hak-hak Minoritas*. Makalah dalam Workshop Yayasan Interseksi, Hak-hak Minoritas dalam *Landscape Multikultural, Mungkinkah di Indonesia?*, Wisma PKBI, 10 Agustus 2004. Dalam http://www.interseksi.org/publications/essays/articles/masyarakat_majemuk.html diunduh 6 juni 2010
- Taneko, Soleman. B. 1990. *Struktur dan Proses Sosial; Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Edisi 1. Cetakan 2. Jakarta: CV Rajawali
- Tumanggor, Rusmin.(et.al). 2009. *Buku Paket Panduan Penyadaran Dan Pendampingan Penguatan Kedamaian (Peace Making)*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, Badan Litbang Dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Zamroni. 1992. *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana